

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)” ini ditulis oleh Toharoh di bimbing oleh Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata kunci: Sanksi Tindak Pidana Pedofilia perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Penelitian dalam Tesis ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan mengenai kasus pelecehan seksual termasuk pedofilia karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dan bagi yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan baik menurut hukum positif dan hukum Islam maupun yang melanggar Hak Asasi Manusia akan dikenakan sanksi agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Rumusan masalah dalam penulisan Tesis ini ialah: (1) Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung?, (2) Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung, (2) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Metode penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis penelitian ini merupakan pengamatan wawancara dan menelaah dokumen. Dan juga teknik analisa datanya menggunakan reduksi data dan penyajian datanya data display, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang berada di Pengadilan Negeri Tulungagung yang terdapat didalam putusan nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan pertimbangan dari hakim, yaitu terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sehingga dijatuhkan sanksi hukuman penjara enam tahun dan denda lima puluh juta rupiah. (2) Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg ini sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dijatuhkan sanksi hukuman penjara sepuluh tahun, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung hanya enam tahun, namun demikian kesesuaian ini di dasari oleh beberapa pertimbangan hakim saat memutuskan perkara. Sedangkan didalam hukum Islam mayoritas ulama' berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia yang sudah menuju ketingkat persetubuhan dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah dilempari batu sampai mati, ada juga beberapa pendapat dari Mazhab Hambali yaitu bagi pelaku tindak pidana pedofilia disanksi hukuman ta'zir yaitu sanksi hukumannya di serahkan kepada penguasa. Didalam Putusan Pengadilan negeri Tulungagung terkait sanksi tindak pidana pedofilia sudah sesuai dengan hukum Islam karena

didalam hukum Islam setiap ada perlakuan tindak pidana pedofilia juga mendapatkan sanksi hukuman, kalo di hubungkan dalam hukum Islam maka Sanksi hukuman bagi pelaku pedofilia ialah di Ta'zir yaitu sanksi hukumannya di serahkan kepada penguasa maksut dari penguasa ini yaitu sepertihalnya di serahkan kepada Pengadilan Negeri Tulungagung dan di putuskan oleh anggota Hakim.

ABSTRACT

Thesis with the title “Penalties criminal act of Pedophile on Human and Islamic Law Rights Perspective (Studying at the Tulungagung District Court)” is written by Toharoh guided by Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

Keywords: Penalties criminal act of Pedophile the perspective on Human Rights and Islamic Law

The research in this thesis is motivated by rampant crimes regarding cases of sexual harassment including pedophilia because the act is a deviant act and those who violate legal rules that have been established both according to positive law and Islamic law and those who violate human rights will be subject to sanctions. so that the perpetrator becomes deterred and does not repeat his actions again.

The formulation of the problem in this research is: (1) What are the sanctions for the perpetrators of pedophilia in the Tulungagung District Court?, (2) What are the sanctions for the perpetrators of pedophilia from the perspective of Human Rights and Islamic Law in the Tulungagung District Court?. The objective of this research is: (1) This is to find out the sanctions for the perpetrators of pedophilia in the Tulungagung District Court, (2) To find out the sanctions for the perpetrators of pedophilia in the perspective of Human Rights and Islamic Law in the Tulungagung District Court.

The research method in this paper uses qualitative methods, namely the type of field research. The data collection techniques used by the authors of this study were interview observations and document review. And also the data analysis technique uses the reduction and presentation of the data display data, and drawing conclusions and verification.

The results of this study the authors concluded that: (1) Sanctions for pedophile offenders who are at the Tulungagung District Court contained in decision number 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg are in accordance with legal provisions and considerations of the judge, that is, the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act by inducing a child to commit or allow the obscene act to be committed, then sentenced to six years imprisonment and a fine of fifty million rupiah. (2) The sanctions given to perpetrators of pedophilia in the Tulungagung District Court in number 321/Pid.Sus/2019/PN Tlg are in accordance with Human Rights, namely law number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, was sentenced to ten years in prison, and in the verdict of the Tulungagung District Court it was only six years, however this conformity was based on several considerations by the judge when deciding the case. Whereas in Islamic law the majority of scholars' argued that the punishment for pedophile offenders who have reached the level of sexual intercourse is subject to zina, namely being flogged a hundred times and exiled for one year for those who are not married, while those who are married are stoned to death. There are also several opinions from the Mazhab Hambali, namely for the perpetrators of the criminal act of pedophilia, ta'zir punishment, namely the punishment given to the

authorities. In the Tulungagung District Court Decision regarding the criminal sanction of pedophilia is in accordance with Islamic law because in Islamic law, every time there is a criminal act of pedophilia also gets a penalty, If linked in Islamic law, the penalties for in Ta'zir pedophiles are, namely the penalties are handed over to the of ruler intent ruler of this, such as being submitted to the Tulungagung District Court and decided by members of the Jud.